

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis mengenai topik penelitian ini yang membahas mengenai Peran Audit Internal dalam pelaksanaan Audit Operasional terkait Proses Belajar Mengajar (PMB) untuk mewujudkan *Good University Governance* pada Universitas Komputer Indonesia.

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Definisi Audit Internal

Definisi Audit Internal menurut Hiro Tugiman (2014:11) adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Sedangkan definisi Audit Internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2014:11) adalah sebagai berikut:

“Audit Internal adalah jaminan independen objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, membentuk organisasi dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Internal Audit* adalah suatu fungsi penilaian dan penelitian yang independen untuk menguji, mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

2.1.1.2 Definisi Auditor Internal

Definisi Auditor Internal menurut Hery (2017:4) adalah sebagai berikut:

“Auditor Internal merupakan auditor yang bekerja pada satu manajemen organisasi sehingga berstatus sebagai karyawan dari organisasi tersebut. Auditor Internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor Internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di satu organisasi.”

Sedangkan definisi Auditor Internal menurut Mulyadi (2013:29) adalah sebagai berikut:

“Auditor Internal sebagai auditor yang bekerja dalam organisasi yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh top management telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Auditor Internal adalah auditor yang bekerja di dalam organisasi untuk memberikan peran dalam pengawasan dan penilaian serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah efektif dan efisien.

2.1.1.3 Aktivitas Audit Internal

Aktivitas Audit Internal menurut Hery (2017:239) adalah sebagai berikut:

- 1) Audit Keuangan
Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan. Audit keuangan berusaha untuk memverifikasi adanya aset dan untuk memperoleh kepastian bahwa terhadap aset itu telah diadakan pengamanan yang tepat. Di samping itu yang lebih penting lagi adalah bahwa keserasian dari sistem pembukuan serta pembuatan laporan akan diperiksa dalam *financial auditing* ini.
- 2) Audit Operasional
Pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya. Auditor Internal melakukan kegiatan pemeriksaan operasional meliputi perluasan dari pemeriksaan intern pada semua operasi organisasi.

2.1.1.4 Indikator Audit Internal

Menurut Harnovinsah et, al (2020:343) Audit Internal dalam perkembangannya memiliki peran yang dijalankan oleh auditor internal digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Watchdog*
Peran auditor internal sebagai *watchdog* memastikan bahwa kegiatan organisasi telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan organisasi. Auditor Internal perlu mengidentifikasi dan mengoreksi jika adanya penyimpangan pada sistem pengendalian internal.
- 2) Konsultan
Auditor internal dapat memberikan saran terkait dengan pengelolaan kegiatan organisasi, sehingga dapat membantu pimpinan dalam memecahkan masalah.
- 3) Katalis
Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan saran dan masukan yang dapat diaplikasikan pada kegiatan organisasi, meskipun tidak ikut terlibat dalam aktivitas operasional tersebut.

2.1.2 Audit Operasional

2.1.2.1 Definisi Audit Operasional

Definisi Audit Operasional menurut Sukrisno Agoes (2017:14) adalah sebagai berikut:

“Audit Operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.”

Sedangkan definisi Audit Operasional menurut IBK Bayangkara (2016:2) adalah sebagai berikut:

“Audit Operasional adalah evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan yang dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang dapat diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Audit Operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional pada organisasi dalam mengetahui apakah aktivitas dan program yang dirancang telah sesuai dengan yang direncanakan dan telah digunakan secara efektif dan efisien. Kegiatan audit operasional yang dilakukan oleh auditor internal pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan Proses Belajar Mengajar (PBM).

2.1.2.3 Indikator Audit Operasional

Audit operasional dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS) dalam memeriksa kegiatan proses belajar mengajar (PBM) agar berjalan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Indikator Audit Operasional yang dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS) menurut Buku 9 Revisi-2 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Direktorat *Quality Assurance* (2017:8) adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi
Para Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS) setiap minggu melakukan pengecekan atau pemeriksaan Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) melalui Sistem Informasi Pencatatan, Perkuliahan dan Absensi Online (SIPP Online). Kemudian dilakukan rekapitulasi secara bulanan dan dilaporkan kepada Direktorat *Quality Assurance*. Apabila inputan antara RPS dengan inputan dosen terkait materi ajar tidak sama, maka para UPMPS akan melakukan diskusi kemudian dilaporkan kepada Ketua Program Studi. Selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada dosen yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi ketidaksamaan tersebut.
- 2) Monitoring
Hasil dari diskusi antara Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS) dengan dosen yang bersangkutan akan dilaporkan oleh UPMPS secara bulanan kepada *Direktorat Quality Assurance*. Atas ketidaksamaan tersebut, di bulan berikutnya akan dilakukan monitoring kembali atas dosen yang bersangkutan sehingga Proses Belajar Mengajar (PBM) kembali sesuai dengan RPS.

2.1.3 *Good University Governance*

2.1.3.1 Definisi *Good University Governance*

Definisi *Good University Governance* menurut Wijatno dalam buku Muhammad Tajuddin (2015:39) adalah sebagai berikut:

“*Good University Governance* merupakan prinsip-prinsip dasar konsep *good governance* dalam sistem dan proses *governance* pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. Konsep yang diterapkan dalam *Good University Governances* menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang perlu diterapkan oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas.”

Sedangkan definisi *Good University Governance* menurut Ely Siswanto (2013:27) adalah sebagai berikut:

“*Good University Governance* merupakan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur (*values*), baik dalam hal akademik maupun *social values* yang harus dijaga, sehingga dapat menjadi *means* atau alat untuk mendukung pencapaian tujuan dari perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi sebagai korporasi nirlaba (*nonprofit corporation*) harus memiliki pengelolaan yang sehat demi kepentingan *stakeholder*, sehingga harus menerapkan prinsip *good governance* meliputi independensi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan keadilan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Good University Governance* adalah prinsip dasar *Good Governance* yang diterapkan pada perguruan tinggi berdasarkan nilai-nilai luhur (*values*) yang harus dijunjung tinggi sehingga tujuan dari perguruan tinggi tersebut dapat tercapai.

2.1.3.2 Indikator *Good University Governance*

Menurut Wijatno (2009:119) indikator *Good University Governance* adalah sebagai berikut:

- 1) *Transparansi (Transparency)*
Transparansi dibangun atas dasar prinsip keterbukaan baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan relevan berkaitan dengan kegiatan organisasi. Transparansi pada perguruan tinggi perlu menerapkan prinsip keterbukaan terkait dengan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) *Akuntabilitas (Accountability)*
Akuntabilitas ialah kejelasan fungsi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan dalam organisasi terlaksana secara efektif. Perguruan tinggi harus memiliki kejelasan pada uraian tugas dan tanggung jawab terkait aspek kegiatan operasional di dalam lingkungan universitas agar dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- 3) *Responsibilitas (Responsibility)*
Responsibilitas ialah kemampuan organisasi dalam mengatur sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan universitas harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan job description yang telah ditetapkan.
- 4) *Independensi (Independence)*
Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dapat dibuat demi kepentingan universitas.
- 5) *Keadilan (Fairness)*
Perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terdiri atas mahasiswa, masyarakat, para dosen, dan karyawan non-akademis, serta pengurus yayasan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan pemeriksaan operasional pada kegiatan organisasi, seorang auditor harus berperan dalam memberikan pengawasan dan penilaian atas aktivitas yang dilakukan agar berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hery (2018:89) menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal harus dapat mencakup penilaian atas risiko, jaminan pengendalian dan kepatuhan, sehingga secara langsung akan mempengaruhi tata kelola. Seorang auditor internal dapat memberikan penilaian dan saran-saran yang

tepat untuk memperbaiki proses tata kelola pada organisasi. Apabila seorang auditor internal tidak dapat memberikan pengawasan dan saran yang tepat, maka tata kelola pada organisasi akan menjadi tidak baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh I wayan Sujama, I wayan Widnyana, dan I Nyoman Suparsa (2017) menunjukkan hasil bahwa auditor internal berperan positif dan signifikan dalam menentukan pengaruh pengendalian terhadap *good university governance* di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Artinya, auditor internal memiliki peranan dalam mewujudkan *Good University Governance* di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Selain itu terdapat teori lain yang berkaitan dengan peranan audit internal pada kegiatan operasional organisasi. Hernan Murdock (2016:13) menyatakan bahwa peranan audit internal diperlukan oleh suatu organisasi untuk menjadi seorang konsultan yang independen dalam memberikan penilaian, pengawasan dan saran yang tepat untuk meningkatkan kegiatan operasional organisasi. Hal itu dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, serta dapat meningkatkan tata kelola menjadi lebih baik. Menurut penelitian ini diperkuat oleh Dri Asmawanti dan Siti Aisyah (2017) menunjukkan hasil analisis bahwa peran Audit Internal dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencapaian *Good University Governance* pada perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi yang positif melalui pengimplementasian prinsip *Good University Governance* melalui satuan penjaminan mutu perguruan tinggi. Salah satu upaya dalam meningkatkan *Good University Governance* pada

perguruan tinggi yaitu dengan meningkatkan penjaminan mutu pada Proses Belajar Mengajar (PBM).

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:63) menyatakan bahwa Hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat penelitian yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

- H1: Audit Internal berperan dalam Pelaksanaan Audit Operasional terkait Proses Belajar Mengajar (PBM) pada Universitas Komputer Indonesia.
- H2: Audit Internal berperan untuk Mewujudkan *Good University Governance* pada Universitas Komputer Indonesia.